

BAB IV
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
GADAI POHON KELAPA

A. Analisa hukum Islam terhadap barang jaminan

Telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa yang dimaksud dengan gadai pohon kelapa yang terjadi di kecamatan Masalembu adalah penyerahan atas sebidang kebun kelapa oleh pemilik atau ahli warisnya kepada penerima gadai sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman yang diterimanya dari penerima gadai untuk kemudian dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh penerima gadai sampai pihak pemberi gadai dapat menebus kembali atau melunasi hutangnya kepada penerima gadai.

Dari pengertian tersebut diatas dapat di fahami bahwa dalam transaksi gadai pohon kelapa barang yang dijadikan jaminan adalah berupa benda tetap (mal uqār) dan benda semacam ini belum pernah dijadikan jaminan dalam utang piutang pada masa Rasulullah.

Beberapa hadis Nabi dalam masalah gadai (rahn) menunjukkan bahwa yang dijadikan barang jaminan adalah benda-benda yang tergolong benda bergerak (mal manqūl) sebagaimana hadis berikut ini :

kan benda secara umum, berdasarkan ayat ini maka-gadai pohon kelapa yang menjadikan barang bergerak sebagai jaminan adalah tidak bertentangan dengan ayat tersebut diatas.

Dilihat dari segi sifat atau keadaan barang - yang dijadikan jaminan dalam gadai pohon kelapa dapat dianggap sah dan sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam fiqh Islam antara lain :

1. Barng jaminan harus benar-benar milik pemberi gadai dan ia mempunyai kekuasaan terhadap benda tersebut.
 2. Barang jaminan (marhūn) harus berwujud benda.
 3. Barang jaminan (marhūn) harus mempunyai manfaat menurut syara'.
 4. Marhūn bukan benda yang cepat rusak.
- (Al-Jaziri, II, tt : 330).

Syarat-syarat yang telah dikemukakan tersebut - diatas juga terdapat dalam transaksi gadai pohon kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Masalembu, seperti sebelum terjadinya gadai pohon kelapa terlebih dahulu harus keadaan barang jaminan baik tempatnya maupun batas-batasnya dan juga terlebih dahulu harus diketahui apakah kebun atau pohon kelapa yang dijadikan benar-benar milik atau hak pemberi gadai.

pada pihak penggadai, karena motif menggadaikan sesuatu pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak sebab tidak ada jalan lain yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sama halnya yang dialami masyarakat Masalembu yang melakukan gadaai pohon kelapa, sehingga tidak layak penerima gadaai mengambil hasil dengan berlipat ganda terhadap orang yang memerlukan pertolongan.

Apabila dihubungkan dengan beberapa hadis tentang hak murtahin (penerima gadaai) terhadap barang jaminan, maka apa yang telah dilaksanakan oleh penerima gadaai dalam penggadaian kebun kelapa di masyarakat Masalembu yakni berhak memanfaatkan dan mengambil hasilnya tanpa ada biaya perawatan adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena dalam beberapa hadis tersebut di atas telah dijelaskan bahwa pemanfaatan atau pengambilan hasil dari barang jaminan hanyalah sebesar biaya perawatan atau makanan yang telah dikeluarkan, bahkan hadis Hammad bin Salamah di muka mengatakan bahwa apabila penerima gadaai memungut hasil dari barang jaminan itu melebihi harga makanan atau biaya perawatan, maka kelebihan itu adalah termasuk riba.

Disamping itu barang jaminan semata-mata hanya berfungsi sebagai penguat dan kepercayaan agar pihak

yang berupa kebun kelapa sampai ia dapat mengembalikan uang pinjaman karena adanya keterpaksaan, sebab apabila dilihat dari latar belakang terjadinya gadai pohon kelapa, maka gadai pohon kelapa adalah merupakan suatu tindakan darurat demi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memang sudah tidak mendapatkan pekerjaan lain yang harus ditempuh, sehingga dengan rasa terpaksa ia menggadaikan kebun kelapanya dan memberikan izin kepada penerima gadai untuk mengambil seluruh hasil dari kebun kelapa tersebut, karena apabila tidak demikian mereka tidak akan mendapatkan pinjaman padahal kebutuhan semakin mendesak. Kerelaan yang semacam inilah dapat merubah hukum yang halal menjadi haram, disebabkan adanya unsur eksploitasi yang mengakibatkan kerugian dipihak pemberi gadai dan memberikan keuntungan kepada penerima gadai.